

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo

Lisa Anggreani*

Abstrak

Implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk dari relasi kebijakan pemerintah yang penting untuk dilaksanakan agar sampai ke tujuan implementasi. Implementasi kebijakan harus memiliki stakeholder yang tepat karena akan berdampak baik dan berguna untuk masyarakat selaku penerima kebijakan, seperti halnya dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo. Seperti yang diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemsikinan. Dalam perda Sidoarjo tersebut terdapat beberapa program penanggulangan kemsikinan salah satunya tentang program penanggulangan kemsikinan berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah. (UMKM) di kabupaten Sidoarjo, yang berfokus kepada program dana bergulir agar dapat sampai kepada masyarakat pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan teori dari Marilee S. Grindle dengan mengukur keberhasilan implementasi kebijakan melalui dua variabel yaitu variabel isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini akan menjelaskan bagaimana implementasi penanggulangan kemiskinan berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah dan bagaimana lingkungan implementasi kebijakan memepengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

* Mahasiswa Program Sarjana Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga. Email: lisa.anggreani12354@gmail.com

ABSTRACT

Of policy and the constituting a form of from their colleagues the government policy that is essential for in order to ensure that food prices was carried out actually reached their intended recipient the implantation of the .It is them who need of policy and the necessary that it should have an exact pattern for its because it will impact good and profitable to the rest of us on the part of recipient and damage to property caused these changes to government policy , as is the case with of policy and the poverty reduction micro small and medium enterprises (micro small and medium enterprises) one that is run by the district government sidoarjo .As stipulated stood up in the paper the bylaw no 02 years 2016 about of reducing the incidence of kemsikinan .Out in local government regulation sidoarjo there are consist of some of these programs of reducing the incidence of kemsikinan one of the ways is in article 14 the letter c about the program of reducing the incidence of kemsikinan based micro small and medium enterprises .(micro small and medium enterprises) in kabupaten sidoarjo , who focus on revolving fund program to make it capable in reaches the community several sample business operators. This research using a theory of marilee s.Grindle by measuring the success of the policy through two variables namely variable the policy and the environment policy.The result of this research will explain how the implementation of poverty reduction small and medium enterprises and how the environment policy implementation memepengaruhi success policy.

Keywords: implementation policy, poverty reduction, small and medium enterprises (UMKM)

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang rumit, kompleks dan harus segera diselesaikan. Di Indonesia permasalahan kemiskinan masih menjadi fokus utama untuk diatasi.Kemiskinan merupakan suatu hal yang sangat krusial yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.oleh karena itu

pemerintah mengeluarkan beberapa landasan hukum yang mengatur penanggulangan kemiskinan.

Di Indonesia program penanggulangan kemiskinan memiliki beberapa landasan hukum salah satunya ditegaskan didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat beberapa landasan hukum tentang penanggulangan kemiskinan, antara lain sebagai berikut ini : (1) UU Nomor 13 tahun 2011. (2) Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010. (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981. (4) Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 02 tahun 2016.

Dalam program penanggulangan kemiskinan daerah terdapat upaya untuk menetapkan penerimaan program perlindungan social yang sudah ditetapkan dalam peraturan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Pemerintah telah mengklasifikasi bentuk program kemiskinan, yang terdiri dari 4 klaster, yaitu : (1). Kelompok program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan serta upaya untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin kabupaten Sidoarjo. (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin, karena penyebab kemiskinan bukan hanya saja dipengaruhi oleh aspek-aspek yang berupa materialistik saja, melainkan minimalnya akses untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan ini ditujukan untuk masyarakat miskin untuk mengolah sumberdaya alam agar dapat dipergunakan dan untuk menggali kemampuan dan potensi yang dimiliki. (3) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil, program ini bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan jangka panjang dengan cara pemberdayaan usaha mikro kecil yang memiliki tujuan sebagai penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala kecil menengah. (4) Program Pro Rakyat Lainnya. Di

Kabupaten Sidoarjo, jumlah rumah tangga sasaran (yang selanjutnya disingkat dengan RTS) penerima program ¹

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (yang selanjutnya disingkat dengan P-BDT) yang dilakukan melalui sensus oleh Badan Pusat Statistik (yang selanjutnya disingkat dengan BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (yang selanjutnya disingkat dengan TNP2K) pada tahun 2015 berjumlah 117.270 RTS. Jumlah RTS tersebut dipastikan mendapat berbagai program penanggulangan kemiskinan baik program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (yang selanjutnya disingkat dengan APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (yang selanjutnya disingkat dengan APBD) Provinsi maupun APBD Kabupaten Sidoarjo. Dan selanjutnya yang dijadikan sebagai acuan dalam program pengentasan kemiskinan pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Di Jawa Timur permasalahan kemiskinan masih menjadi fokus utama karena pesebaran kemiskinan yang cukup meningkat di Provinsi Jawa Timur pemerintah gencar melakukan penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, dibuktikan dengan data BPS(Badan Pusat Statistik) provinsi Jawa Timur angka kemiskinan tiap tahunnya berkurang. Kabupaten Sidoarjo memiliki urutan ke-33 dengan presentase penduduk miskin dengan jumlah 6.7% sedangkan urutan wilayah dengan penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur ialah Kabupaten Sampang dengan 27.08% penduduk miskin. Hal ini merupakan hasil dari usaha pemerintah melakukan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan dilandasi beberapa landasan hukum salah satunya yaitu peraturan daerah sidoarjo nomor 02 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan. Dalam perda tersebut terdapat upaya untuk menetapkan penerimaan bantuan sosial, dalam isi peraturan daerah sidoarjo

¹Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. *Profil Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sidoarjo* tahun 2017, hal 2-3.

tersebut program penanggulangan kemiskinan di klasifikasikan menjadi 4 klaster program, yaitu: (1) Kelompok Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. (2) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. (3) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro. (4) kelompok program lainnya yang meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat miskin.²

Adanya Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 02 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan di kabupaten Sidoarjo memiliki tujuan menanggulangi kemiskinan, mengurangi beban hidup masyarakat miskin, melakukan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin di wilayah kabupaten Sidoarjo. Fokus penulisan ini ada didalam Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 02 tahun 2016 pasal 14 huruf c yang berfokus kepada penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro. Dalam penanggulangan kemiskinan berbasis usaha ekonomi mikro ini terdapat upaya yang dilakukan antara lain dengan cara melakukan peningkatan permodalan, perluasan akses program pinjaman modal dengan bunga ringan, peningkatan pemberian dana bergulir, serta peningkatan sarana dan prasarana agar mendukung kegiatan usaha ekonomi mikro berjalan.

Sidoarjo sebagai kota dengan julukan UMKM terbesar di Indonesia. Menurut data dari dinas koperasi dan UMKM kabupaten Sidoarjo tahun 2014 Sidoarjo memiliki jumlah UMKM kurang dari 171.264 unit dengan rincian UMKM sebagai berikut: Total Usaha Mikro berjumlah 154.891 unit, Usaha kecil menengah berjumlah 154 unit dan usaha besar berjumlah 16.000 unit. Kabupaten Sidoarjo memiliki 82 sentra industri rakyat dan 11 kampung usaha. Hal ini, menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat yang secara tidak langsung menggerakkan system perekonomian Kabupaten Sidoarjo.³ Dengan kata lain,

²Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. *Profil Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sidoarjo tahun 2017*. hlm 2-3

³Sidoarjo(2015). Ison Khoirul. 25 Agustus 2015. [Diakses April 2018] https://www.kompasiana.com/issonkhairul/menteri-ekonomi-asean-fokus-ke-ukm-sidoarjo-miliki-171-264-unit-usaha-mikro_55dc0a14f77e61960cf05eb4

perekonomian Kabupaten Sidoarjo terbanyak berasal dari Usaha Mikro Kecil Menengah.

Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 02 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan. Serta apakah didalam lingkungan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis UMKM di kabupaten Sidoarjo sudah mendukung kebijakan tersebut berjalan. Penelitian ini menggunakan teori dari Marilee S. Grindle tentang keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel yang saling mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel tersebut ialah variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*). Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle dijelaskan sebagai berikut.

Dalam isi kebijakan atau *content of policy* terdapat 5 poin yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, antara lain sebagai berikut : (1) kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, poin ini sangat berpengaruh kepada keberhasilan implementasi kebijakan karena kepentingan yang ada didalam kebijakan haruslah mencakup kepentingan publik, atau harus mendahulukan kepentingan bersama tidak boleh mementingkan kepentingan individu atau kepentingan kelompok atau golongan. (2) Tipe Manfaat, didalam tipe manfaat harus memberikan manfaat yang memiliki jangka waktu panjang dan harus menyentuh keseluruhan pihak. Manfaat yang dirasakan tersebut berbeda. (3) Derajat Perubahan, kebijakan yang dibuat haruslah memiliki perubahan, perubahan tersebut ada dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. (4) Letak pengambilan keputusan, dalam poin ini letak pengambilan keputusan sangat berpengaruh kepada keberhasilan implementasi. Karena, sebelum melakukan proses implementasi kebijakan haruslah memiliki letak pengambilan keputusan yang tepat yang memiliki manfaat yang harus dirasakan seluruh masyarakat atau public. (5) Pelaksana Program harus yang berkopeten dalam menjalankan program yang sedang dilaksanakan. (6) Sumber Daya, sumber daya memiliki pengaruh

dalam implementasi kebijakan. Sumber daya dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya manusia, sumber daya dana, dan sumber daya metoda.

Sedangkan didalam lingkungan kebijakan atau *context of implementation*. Dalam lingkungan implementasi kebijakan menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah implementasi kebijakan berjalan atau tidak kebijakan tersebut. Dalam lingkungan kebijakan terdapat 3 poin yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, poin tersebut antara lain : (1) Kepentingan actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. (2) Karakteristik rezim atau lembaga yang berkuasa. (3) Tingkat kepatuhan atau respon dari penerima kebijakan juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.⁴

Didalam penelitian sebelumnya yaitu berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah kota Malang dalam Strategi Penanggulangan kemiskinan daerah Kota Malang. Penelitian yang dilakukan oleh Niken Larasati ini berfokus kepada Implementasi Perwali No. 28 tahun 2014. Penanggulangan kemiskinan tersebut berfokus dengan memberikan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Malang, dengan cara menyelenggarakan pembangunan yang ramah lingkungan, mengembangkan pariwisata yang berbudaya guba menuju masyarakat yang maju dan mandiri sesuai dengan amanat perwali dan mengikuti kaidah konvensional dan kebijakan formal di atasnya. Pembangunan dan pengembangan pariwisata tersebut seperti pembangunan kawasan wisata jodipan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhamadiyah Malang, dengan melakukan itu perekonomian masyarakat Kota Malang bisa dibantu.⁵

Penelitian selanjutnya ialah penelitian dari Ariq Muhamadi. dengan menggunakan Teori Implementasi Merilee S. Grindle meneliti tentang Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima (PKL) di Taman Pinang Sidoarjo. Fokus penelitian kajian ini menitik beratkan kepada konflik kepentingan antara pedagang kaki lima dengan

⁴Grindle, Merille S. 1980. Politik dan Implementasi di Dunia Ketiga. Prince University Press. Hlm 11 (Dalam Terjemah)

⁵Larasti, Niken. (2017) *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan daerah Kota Malang*. Skripsi. Universitas Airlangga, Surabaya

warga di kabupaten Sidoarjo. Di dalam peraturan daerah Sidoarjo nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan pemerintah kabupaten Sidoarjo ialah menata dan membuat lokasi yang strategis kepada PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum.⁶

Proses Implementasi Kebijakan

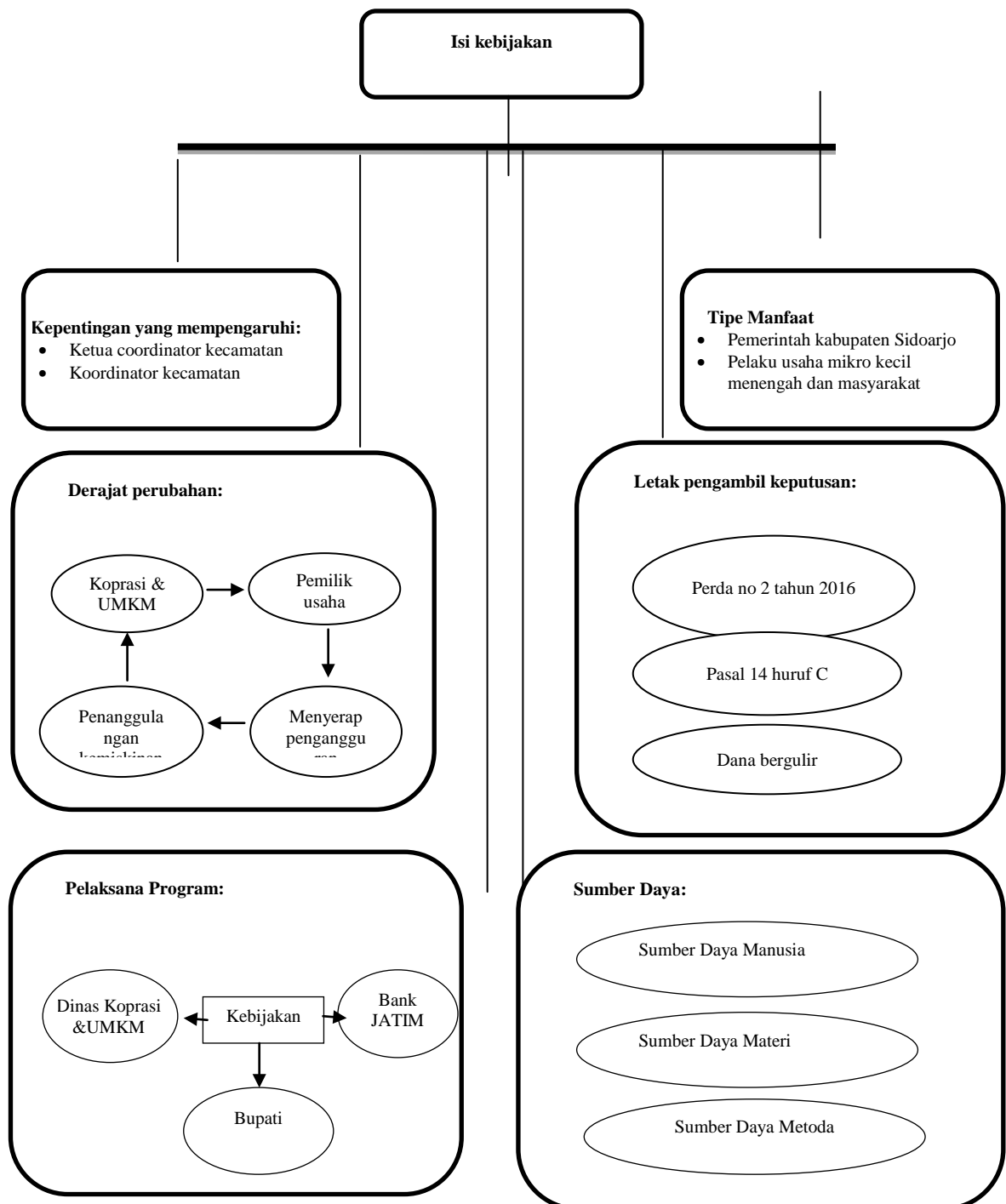
Proses implementasi merupakan suatu urutan dalam kegiatan aktivitas dari kebijakan public yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan pada tahap implementasinya sedangkan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, dalam penelitian ini terdapat dua yaitu: 1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan. Hasil dari penelitian pada poin pertama ini ialah kepatuhan dinas koperasi dan UMKM menjalankan perintah yang mengacu pada Peraturan daerah nomor 02 tahun 2016 tentang dana bergulir. 2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual. Program dari kebijakan ini berhasil apabila dinilai program dari kebijakan ini membawa dampak seperti yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan dari penerima kebijakan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai. Sedangkan didalam implementasi Peraturan Daerah Sidoarjo nomor 02 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan sudah berjalan dengan tepat karena dipengaruhi 2 variabel.

Di jelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel. Variabel tersebut yaitu Isi kebijakan (*content of policy*) dan Lingkungan Kebijakan (*context of implementation*). Kedua variabel tersebut

⁶Muhamadi, Ariq. (2017). *Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima (PKL) di Taman Pinang Sidoarjo*. Skripsi. Universitas Airlangga

saling mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian yang berjudul Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis usaha mikro kecil menengah di kabupaten Sidoarjo isi kebijakan di Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 dijelaskan dalam bagan seperti dibawah ini.

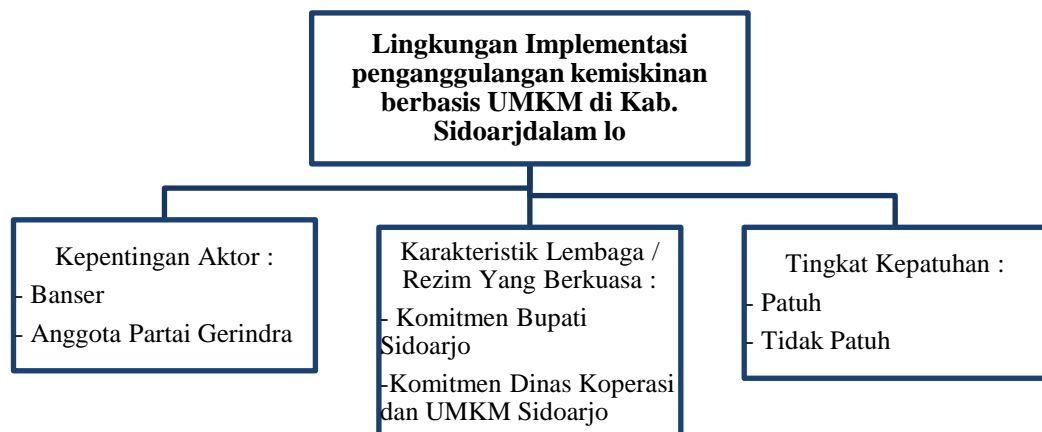
Bagan : Analisis Isi Kebijakan dalam Implementasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo



Bagan di atas menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa poin penting yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam penelitian ini terdapat kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang krusial yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia serta masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri permasalahan sosial tentang kemiskinan sudah menjadi permasalahan yang serius dan segera untuk diselesaikan. Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia, lain halnya dengan Kabupaten Sidoarjo upaya pemerintah Sidoarjo tentang penanggulangan kemiskinan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dalam peraturan daerah ini dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang merupakan perangkat daerah didalam lingkungan pemerintah kabupaten Sidoarjo. Terdapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPKD yang merupakan wadah lintas sektor dinas di Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi kemiskinan di Daerah Sidoarjo. Dinas tersebut antara lain Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Kepentingan tersebut antara lain ketua koordinator kecamatan serta koordinator wilayah yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Poin kedua ialah tipe manfaat dalam bagan diatas dijelaskan terdapat dua tipe manfaat yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro kecil menengah terdapat dua manfaat dari hasil kebijakan tersebut yang pertama ialah penerima manfaat yaitu pelaku usaha atau masyarakat miskin sedangkan penerima manfaat kedua ialah pembuat serta pelaksana kebijakan. Dalam poin ketiga yaitu derajat perubahan, suatu kebijakan harus memiliki derajat perubahan yang merubah dalam kegiatan sosial, politik, maupun ekonomi. Dipenelitian ini derajat perubahan yang dihasilkan salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi. Kegiatan perekonomian warga masyarakat kabupaten Sidoarjo meningkat sejak adanya program UMKM dan bantuan lainnya, angka

pengangguran di wilayah kabupaten Sidoarjo tiap tahunnya mengalami penurunan. Dalam poin keempat yaitu dalam letak pengambilan keputusan terdapat di Bupati Sidoarjo selaku pemegang kuasa tertinggi di wilayah Sidoarjo. Poin kelima yaitu pelaksana program, dalam pelaksana program menentukan keberhasilan implementasi penanggulangan kemiskinan apabila kebijakan sudah dirancang dengan baik namun dalam proses pelaksana program oknum atau actor tidak melaksanakan tugas atau melaksanakan kebijakan dengan tepat maka implementasi dan manfaat kebijakan tersebut tidak dapat memberikan manfaat kepada penerima kebijakan. Poin ke enam yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ialah sumber daya, dalam sumber daya dikelompokkan menjadi tiga yaitu sumberdaya manusia, metoda, serta dana. Ketiga sumber daya tersebut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Bagan : Lingkungan Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis UMKM di Kabupaten Sidoarjo



Selain proses dan isi kebijakan variabel lingkungan memiliki pengaruh dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro kecil menengah terdapat tiga poin yang mempengaruhi poin tersebut antara lain:

(1) kepentingan actor yang terlibat. (2) Karakteristik Rezim atau lembaga yang berkuasa. (3) Tingkat kepatuhan atau respon dari penerima kebijakan.

Dalam model implementasi Grindle ini menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam actor, dimana pada proses akhir tersebut ditentukan oleh materi program yang dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan. Keputusan aktor ini haruslah membuat dampak keada msyarakt penerima kebijakan. Proses politik dalam penelitian ini ialah terlihat dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor.⁷

Dalam ruang lingkup lingkungan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat beberapa kepentingan yang terlibat didalamnya, analisis dari penelitian ini ialah terdapat dua aktor yang memiliki kepentingan berbeda yaitu ketua koordinator wilayah yang merupakan anggota Banser, kemudian terdapat koordinator wilayah yang merupakan kader dari partai Gerindra. Namun, dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator wilayah dan sebagai ketua koordinator harus tidak melibatkan kepentingan apapun didalamnya.

Karakteristik lembaga atau rezim yang berkuasa, dibagian ini dijelaskan bahwa karakteristik lembaga atau rezim yang berkuasa sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Dalam penelitian ini karakteristik lembaga atau rezim yang berkuasa ditunjukkan dalam tingkat komitmen bupati Sidoarjo dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan berbasis UMKM dengan mengeluarkan program dana bergulir. Program dana bergulir ini setiap tahun mengalami peningkatan pendanaan seperti yang dikatakan oleh pak Ismail selaku seksi bina Usaha Koperasi kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa komitmen bupati Sidoarjo dengan UMKM ditunjukkan dengan anggaran dana yang diberikan setiap tahun meningkat serta mengawasi langsung program UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

⁷Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm 66.

Oleh karena itu, peran bupati Sidoarjo dalam upaya peningkatan UMKM dapat dilihat dengan kabupaten Sidoarjo menjadi kota UMKM terbesar dan Bupati Sidoarjo selaku pelaksana dan pembuat program pemberdayaan UMKM harus memiliki komitmen besar dalam menjaga agar Kabupaten Sidoarjo tetap dijuluki dengan kota UMKM terbesar di Indonesia.

Poin ketiga dalam lingkungan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu tingkat kepatuhan dan respon pelaksana atau respon dari penerima kebijakan. Dalam penelitian ini terdapat dua respon yang saling bertentangan yaitu respon kepatuhan terhadap kebijakan maupun respon tidak patuh terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis UMKM di kabupaten Sidoarjo. Respon pelaksana yang kurang setuju dengan adanya program dapat dilihat dari penolakan Sukrim selaku pemilik usaha industri kulit yang ada di Kecamatan Tanggulangin. Menurutnya, pembuatan kerajinan tangan seperti tas kulit selain membutuhkan keahlian juga harus eksklusif (bukan produk masal). Jika pemerintah daerah memberikan pelatihan pembuatan tas kulit kepada masyarakat maka akan menurunkan nilai eksklusifitas dari produk tersebut.

Pernyataan ini menunjukkan penolakan terhadap pemberian dana oleh pemerintah, menunjukan penolakan terhadap program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo, namun dalam penelitian ini respon pelaksana yang menolak tersebut tidak mempengaruhi keberhasilan implementasi. Selain respon yang menolak terdapat respon penerima kebijakan salah satunya ialah bu Lia mega selaku pelaku usaha atau masyarakat miskin yang menerima bantuan program pemberdayaan usaha mikro (dana bergulir) dengan bantuan dana bergulir yang diterimanya bu Lia mega ini dapat membuka rumah makan dan dapat membeli alat pembuatan mie. Menurut penuturan dari bu Lia Mega program dana bergulir serta program-program UMKM lainnya banyak memiliki manfaat serta memberikan pengalaman yang tak ternilai bagi pelaku usaha. Selanjutnya manfaat lain dirasakan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah dalam bidang jasa, yaitu Bu Nur Hayati selaku pemilik jahit Hidayah.

Banyak manfaat yang dirasakan oleh Bu Nur Hayati setelah menerima bantuan dana bergulir. Beliau lebih produktif dalam bekerja serta dapat menyerap lulusan baru guna melatih skill dalam menjahit serta mengurangi pengangguran yang diakibatkan oleh minimnya skill.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini ialah terdapat proses implementasi kebijakan didalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis UMKM. Karena fokus penelitian ini ada di Kabupaten Sidoarjo maka menggunakan Peraturan Daerah Sidoarjo. Implementasi Program penanggulangan kemiskinan berbasis UMKM di kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori dari Marille S. Grindle yang mengukur keberhasilan implementasi kebijakan kepada dua variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dapat disimpulkan beberapa poin guna menjawab rumusan masalah yang ada di penelitian ini.

Poin pertama yaitu dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) terdapat landasan hokum tentang penanggulangan kemiskinan di kabupaten Sidoarjo yaitu dengan menggunakan Perda Sidoarjo nomor 02 tahun 2016. Dalam peraturan daerah tersebut terdapat proses implementasi kebijakan yang melibatkan bebrapa actor didalamnya yaitu: 1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan. Hasil dari penelitian pada poin pertama ini ialah kepatuhan dinas koperasi dan UMKM menjalankan perintah yang mengacu pada Peraturan daerah nomor 02 tahun 2016 tentang dana bergulir. 2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual. Program dari kebijakan dinilai berhasil apabila program tersebut membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil

ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai. Sedangkan didalam implementasi Peraturan Daerah Sidoarjo nomor 02 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan sudah berjalan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Grindle, Merille S. 1980. Politik dan Implementasi di Dunia Ketiga. Prince University Press. (Dalam Terjemah)

Muhamadi, Ariq. (2017). *Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima (PKL) di Taman Pinang Sidoarjo*. Skripsi. Universitas Airlangga

Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Larasti, Niken. (2017) *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan daerah Kota Malang*. Skripsi. Universitas Airlangga, Surabaya

Sidoarjo. 2015. Ison Khoirul. 25 Agustus 2015. [Diakses April 2018] https://www.kompasiana.com/issonkhairul/menteri-ekonomi-asean-fokus-ke-ukm-sidoarjo-miliki-171-264-unit-usaha-mikro_55dc0a14f77e61960cf05eb4